BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua dibagi menjadi tiga sub-bab. Sub-bab pertama menguraikan pemahaman tentang kondisi fisik hutan, yang terdiri atas definisi hutan, kerusakan hutan yang meliputi degradasi dan deforestasi, analisis akar masalah kerusakan hutan, penentuan fungsi kawasan dan pembagian hutan produksi.

batas kemiskinan (Suparlan, 1984) kemiskinan (Syaefudin, 2003) Masyarakat Desa Hutan faktor penyebab (Darusman, 2000) kemiskinan (Ála,1981) pemberdayaan MDH (Adimiharja dan Hikmat, 2001; Teguh, 2004) definisi hutan (-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999) kerusakan hutan:deforestasi dan degradasi (Khan dalam Firkan, 2004) kondisi fisik hutan analisis akar masalah kerusakan hutan (Indra, 2003) penentuan fungsi kawasan dan pembagian jenis hutan produksi (SK Mentri Pertanian No.387) pengertian pengelolaan bersama (Pinkerton; Berkes et al; Mitchel; Rivera; Pomeroy dalam Firkan, 2004) Tinjauan Pustaka bentuk-bentuk pengelolaan bersama (Berkes, dalam Firkan (2004)) unsur-unsur dalam pengelolaan pengelolaan bersama bersama (Mitchell dalam Firkan, (collaborative pembatasan sumber 2004) management) daya dan penggunaannya aspek-aspek penting dalam pengelolaan bersama (Pinkerton distribusi biaya dan dalam Firkan, 2004) manfaat kelembagaan lokal dalam pengelolaan bersama (Uphoff dalam karakteristik sumber Firkan, 2004)) Analisis SWOT (Adnan, 2002) karakteristik pengguna analisis dan alternatif strategi pengelolaan hutan Analytical Hierarchy Process (AHP) lembaga lokal untuk (Indra,2003) pengelolaan bersama tinjauan studi terdahulu

Tabel 2.1 Kerangka Teori

Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sub-bab kedua membahas tentang Penentuan Fungsi Kawasan Hutan dan Pembagian hutan Produksi berdasarkan jenisnya. Sub-bab ketiga membahas tentang pengelolaan bersama (collaborative management). Sub bab empat membahas tentang analisis dan alternatif strategi pengelolaan hutan. Sub bab kelima menguraikan tentang tinjauan studi terdahul. Empat sub-bab pertama dalam pembahasan tersebut pada dasarnya merupakan kerangka teori yang dijadikan landasan peneliti dalam melakukan penelitian. untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 2.1.

2.1 Masyarakat Desa Hutan

Menurut buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Unit II Jawa Timur tahun 2009 batasan-batasan istilah yang di maksud dengan Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal didesa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya.

Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal di desa yang secara administratif dan ekologis berada dan atau berbatasan langsung dengan hutan. Perhutani (1999) mendefinisikan bahwa masyarakat desa hutan adalah orangorang yang bertempat tinggal di desa hutan dan yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya.

Masyarakat desa hutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem hutan. Interaksi antara ekosistem hutan dan sosiosistem masyarakat sekitar hutan akan menentukan kelangsungan pengelolaan sumber daya hutan.

Selanjutnya Darusman (2000) menyatakan bahwa fakta yang sangat kuat dan meluas bahwa ada masyarakat yang hidup di dekat dan didalam hutan, baik bermukim (menetap) maupun nomaden (berpindah-pindah) baik asli/turun-temurun maupun pendatang. Masyarakat sekitar hutan adalah bagian tubuh bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap gerak pembangunan. Lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat sekitar hutan harus diperhatikan karena :

1) Masyarakat sekitar hutan adalah bagian dari ekosistem hutan yang saling tergantung.

- 2) Masyarakat sekitar hutan adalah berhak mendapatkan keadilan, karena selama + 32 tahun terpinggirkan.
- 3) Masyarakat sekitar hutan mempunyai hak untuk berdemokrasi dan hak untuk berdemokrasi dan hak untuk menentukan suatu kebijakan.
- 4) Masyarakat sekitar hutan adalah 35% dari warga negara yang juga ingin sejahtera.
- 5) Masyarakat sekitar hutan dapat menjadi sumber gangguan keamanan hutan.

Secara umum peranan hutan bagi masyarakat yang tinggal disekitar atau dalam kawasan hutan dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagaimana dikemukakan oleh Mubiyarto et.al (1991) yaitu :

- 1) Hutan sebagai penghasil kayu, baik kayu bulat (log), maupun kayu bakar, dan hasil hutan bukan kayu seperti buah-buahan hewan dan daun-daunan.
- 2) Hutan menjadi penyedia lahan untuk kegiatan pertanian. para petani sekitar hutan melihat hutan selain sebagai sumber kehidupan, mereka juga melihat hutan sebagai cadangan bagi perluasan lahan usaha tani, ketika para petani membutuhkan tambahan usaha tani nya karena adanya pertumbuhan penduduk. Kegiatan pertanian tersebut dapat menghasilkan berbagai macam bahan makanan seperti beras, jagung, palawija, dan sebagainya.
- 3) Hutan sebagai sumber makanan ternak dan tempat hidup ternak.

Menurut Darusman dan Bahruni (1999) terdapat tiga hal pokok yang merupakan basis hubungan antara pengelolaan hutan dan masyarakat sekitar hutan yang dapat menunjukkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan. Ketiga hal tersebut adalah :

- Masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya tergantung pada sumber daya hutan, dengan kearipan lokal dan normanorma yang dimilikinya dapat diselaraskan dengan sistem pengelolaan hutan. Pengelolaan sumber daya hutan tidak boleh mengeliminasi atau mengurangi hak-hak masyarakat sekitar hutan.
- 2) Pengelolaan sumber daya hutan tidak boleh mengganggu seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat sekitar hutan.
- 3) Masyarakat sekitar hutan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan aktivitas serta partisipasinya dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Akibat kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan yang sangat miskin karena kurangnya kesempatan para petani maupun masyarakat sekitar hutan untuk mengelola

sumber daya hutan yang disebabkan oleh ketimpangan dalam pembagian pemilikan lahan, maka hal tersebut berakibat pada rusaknya hutan itu sendiri baik itu yang rusak karena penjarahan maupun penyabotan lahan hutan. Simon (1999) menyatakan bahwa petani hutan sebagai satu lapisan sosial yang relatif paling bawah pada umumnya tidak memiliki lahan dan akses petani hutan terhadap sumber daya hutan juga tertutup. Kondisi tersebut semakin menjadikan proses kemiskinan masyarakat sekitar hutan mengalami eskalasi kenaikan yang cukup signifikan.

2.1.1 Kemiskinan

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang menyandang masalah kemiskinan. BPS (2002, dalam Syaefudin, 2003) menyebutkan bahwa masih ada sekitar 30 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan ILO (1999, dalam Syaefudin, 2003) menyatakan bahwa pada saat krisis ekonomi di pertengahan tahun 1998, dari total 80 juta jiwa orang miskin, 39 persen diantaranya merupakan angka kemiskinan absolut di perkotaan. Upaya Orde Baru dalam menanggulangi kemiskinan hanya mampu mengangkat sebagian penduduk miskin sedikit di atas garis kemiskinan (near poor), yang hanya mampu mencukupi kebutuhan fisik minimum, sedangkan hal-hal yang bersifat non fisik belum bisa terpenuhi. Gejolak sosial dan ekonomi politik yang terjadi masih sangat rentan terhadap mereka, sehingga begitu hal itu terjadi, kembalilah mereka pada posisi mereka semula pada posisi kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia, jelas tidak hanya menjadi "milik" pedesaan (petani, buruh tani, buruh nelayan, dsb) tetapi juga merupakan masalah perkotaan. Suparlan (1984) mengemukakan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut, tetapi juga melibatkan masalah masalah sosial yang ada di pedesaan.

2.1.1.1 Batas Kemiskinan

Sajogyo (1988), mengartikan kemiskinan tidak sebatas hanya dicerminkan oleh rendahnya tingkat pendapatan dan pengeluaran. Sajogyo memandang kemiskinan secara lebih kompleks dan mendalam dengan ukuran delapan jalur pemerataan yaitu rendahnya peluang berusaha dan bekerja, tingkat pemenuhan pangan, sandang dan perumahan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kesenjangan desa dan kota, peran serta masyarakat, pemerataan, kesamaan dan kepastian hukum dan pola keterkaitan dari beberapa jalur tersebut. Menurut Bappenas (2002), kemiskinan adalah suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Bank Dunia (1990) mendefinisikan kemiskinan adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US\$ 1 per hari. Selanjutnya Bank Dunia menyebutkan dimensi kemiskinan adalah politik, sosial dan budaya, dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap aset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci/membatasi.

Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas. Biro Pusat Statistik (2002, dalam Syaefudin, 2003) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. Menurut BKKBN (dalam Saefudin, 2003) kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2 kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja dan bepergian, bagian terluas rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Pengertian ini didefinisikan lebih lanjut menjadi keluarga miskin, yakni: (1) Paling tidak sekali seminggu keluarga makan daging ikan/telur, (2) Setahun sekali seluruh anggota keluarga paling kurang satu stel pakaian baru, (3) Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni. Keluarga miskin sekali adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: (1) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih, (2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Pada umumnya kemiskinan didefinisikan sebagai pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh masukan kalori dasar. Salah satu pendekatan yang paling

baik dan mengimplementasikan matriks keseluruhan dari kemiskinan adalah konsep kebutuhan dasar dari Philipina (ADB, 1999, dalam Syaefudin, 2003), yang mendefinsikan dalam 3 tingkat hierarki kebutuhan yaitu: (1) Survival: makan/gizi, kesehatan, air bersih/sanitasi, pakaian (2) Security: rumah, damai, pendapatan, pekerjaan dan (3) Enabling: pendidikan dasar, perawatan keluarga, psikososial.

Menurut Suparlan (1984), kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah; yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Secara konseptual, Sinaga dan White (1980, dalam Sinaga dan White, 1988) membagi kemiskinan ke dalam dua aspek (yang menunjuk pada sumber penyebab): kemiskinan alamiah dan buatan (struktural), Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul akibat sumbersumber daya yang langka jumlahnya dan tingkat teknologi yang dimiliki masyarakat penderita kemiskinan masih sangat langka. Sedangkan kemiskinan struktural lebih diakibatkan oleh perubahan-perubahan ekonomi, teknologi dan pembangunan itu sendiri; kemiskinan itu terjadi karena kelembagaan-kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana-sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Soemardjan (1980, dalam Sayogyo, 1988), menyebutkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumbersumber pendapatan yang tersedia bagi mereka.

2.1.1.2 Faktor-faktor penyebab Kemiskinan

Menurut Ala (1981), penyebab kemiskinan dibedakan atas faktor internal (endogen) dan faktor eksternal (eksogen).

Faktor Internal

Menurut Ala (1981), faktor internal adalah aktor (individu) itu sendirilah yang menyebabkan kemiskinan bagi dirinya sendiri. Menurut Alkostar (dalam Mahasin,1991), faktor internal yang menyebabkan kemiskinan adalah: sifat malas (tidak mau bekerja), lemah mental, cacat fisik dan cacat psikis (kejiwaan). Secara internal masyarakat miskin

adalah karena malas mengakumulasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pada Tabel 2.1 dijelaskan beberapa faktor penyebab kemiskinan secara internal.

Tabel 2.2 Faktor Internal Penyebab Kemiskinan

Item Intenal	Penjelasan
Keterbatasan karakter	Kurang etos kerja: malas, fatalistik
Keterbatasan pendidikan/pengetahuan	Takut menghadapi masa depan, kurang daya juang -Tidak memiliki/tidak terjangkau biaya untu
	menempuh -Tidak memikirkan pendidikan anak-anaknya -Sebagian masih buta huruf
	-Tidak mampu membiayai pendidikan anakanaknya
DIT SSIT	Learning process sangat terbatas untuk meruba perilakunya karena perilaku yang lebih produkt lebih normatif bersumber dari learning process
ER	berada dalam lingkungan dimana <i>learning proce</i> tidak kondusif
Keterbatasan Harta Benda/Ekonomi	Tidak memiliki/minim aset, kurangnya lapanga
	kerja, ekonomi informal (jalanan, tidka diakui, tanj fasilitas apa-apa), buruh kasar-upah rendah, tida punya modal untuk memulai usaha, jaringan krec
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	yang tidak mudah, tidak mampu mengisi sektor ker yang lebih formal, <i>exchange properties</i> yang renda
Keterbatasan Kesehatan	pekerjaan, tidak tetap, pengangguran. Pangan yang tidak memenuhi kebutuhan fis (bahkan sering kelaparan); Rumah yang tidak laya
	(multiguna, tempat kerja, untuk tempat juala menumpuk dan memilah-milah barang beka kerajinan dan berbagai kegiatan ekonomi sekt
	informal lainnya; lingkungan perumahan yang tid sehat (kumuh), MCK yang tidak layak/pinggir ka
	listrik yang terbatas, air bersih terbatas; lemahn ketahanan fisik karena rendahnya konsumsi pang baik kuantitas maupun kualitas sehingga konsum
	gizi mereka sangat rendah yang berakibat pa rendahnya produktivitas mereka; bila sakit t
	mampu berobat, bahkan anak sering sakit kare mengkonsumsi air yang tidak bersih
Keterbatasan Ketrampilan	Rendahnya <i>learning process</i> karena tidak memili biaya untuk mengikuti sekolah, kursus, atau pelatih
	yang menambah ketrampilan mereka
Keterbatasan Penghargaan	Tersingkirkan dari institusi masyarakat atau bahk pemerintrah. Hanya sering dipolitisasi tapi jara direalisasi perbaikan nasibnya
Keterbatasan	-Suaranya jarang didengar baik secara kelompo
Kekuasaan	apalagi secara individu;
	-Tidka cukup kekuatan tawar menawar/tidak berda untuk memperjuangkan nasibnya/tidak memili
	akses ke proses pengambilan keputusan yan menyangkut hidup mereka.
	-jarang menang dalam bernegosiasi ekonomi
Keterbatasan	Terhimpit persoalan hidup sehari-hari untuk menca

Sumber: Ala (1981)

Faktor Eksternal

Menurut Ala (1981), kemiskinan yang disebabkan faktor eksternal (eksogen) adalah terjadinya kemiskinan disebabkan oleh-oleh factor10 faktor yang berada di luar diri si aktor tersebut. Faktor eksternal terdiri dari: Faktor Alamiah dan Faktor Buatan (struktural).

Faktor Alamiah

Ada beberapa faktor alamiah yang menyebabkan kemiskinan, antara lain: keadaan alam yang miskin, bencana alam, keadaan iklim yang kurang menguntungkan. Kemiskinan alamiah dapat juga ditandai dengan semakin menurunnya kemampuan kerja anggota keluarga karena usisa bertambah dan sakit keras untuk waktu yang cukup lama.

Faktor Buatan(Struktural)

Faktor buatan yaitu terjadinya masyarakat miskin karena tidak mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara cepat (dalam arti yang menguntungkan) terhadap perubahan-perubahan teknologi maupun ekonomi, mengakibatkan kesempatan kerja yang dimiliki mereka semakin tertutup. Mereka tidak mendapatkan hasil yang proporsional dari keuntungan-keuntungan akibat dari perubahan perubahan itu.

Menurut Frans Seda (Ala, 1981), kemiskinan buatan (struktural) itu adalah buatan manusia, dari manusia dan terhadap manusia pula. Kemiskinan yang timbul oleh dan dari struktur-struktur (buatan manusia), dapat mencakup baik struktur ekonomi, politik, social dan kultur. Strukturstruktur ini terdapat pada lingkup nasional maupun internasional. Hal ini senada dengan pendapat Soedjatmoko (1980, dalam Prisma, 1989), "Pola ketergantungan, pola kelemahan dan eksploitasi golongan miskin berkaitan juga dengan pola organisasi institusional pada tingkat nasional dan internasional".

Menurut Alkostar (Mahasin, 1991), faktor eksternal penyebab terjadinya kaum miskin adalah:

- (1) Faktor ekonomi: kurangnya lapangan kerja; rendahnya pendapatan per kapita dan tidak tercukupinya kebutuhan hidup.
- (2) Faktor Geografi: daerah asal yang minus dan tandus sehingga tidak memungkinkan pengolahan tanahnya.
- (3) Faktorl Sosial: arus urbanisasi yang semakin meningkat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosialnya.

- (4) Faktor Pendidikan: relatif rendahnya tingkat pendidikan baik formal maupun informal.
- (5) Faktor Kultural: pasrah kepada nasib dan adat istiadat yang merupakan rintangan dan hambatan mental.
- (6) Faktor lingkungan keluarga dan sosialisasi.
- (7) Faktir kurangnya aasar-dasar ajaran agama sehingga menyebabkan tipisnya iman, membuat mereka tidak mau berusaha.

2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan

Pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat, 1997).

Adimihardja dan Hikmat (2001) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan pelimpahan proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab secara penuh. Pemberdayaan bukan berarti melepaskan pengendalian, tapi menyerahkan pengendalian. Dengan demikian pemberdayaan bukanlah masalah hilangnya pengendalian atau hilangnya hal-hal lain. Yang paling penting, pemberdayaan memungkinkan pemanfaatan kecakapan dan pengetahuan masyarakat seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Menurut Priyono dan Pranarka (1996) proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekan pada proses memberikan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. *Kedua*, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Menurut Moebyarto (1985), pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber hidup yang penting. Proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial sehingga kemampuan individu "senasib" untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan

BRAWIJAY/

yang paling efektif. Bagaimana memberdayakan masyarakat merupakan satu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat power (daya). Pada dasarnya daya atau power tersebut dimiliki oleh setiap individu dan kelompok, akan tetapi kadar dari power tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan dan jenis kelamin. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan antar individu dengan dikotomi subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai). Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subyek dan obyek tersebut merupakan relasi yang ingin "diperbaiki" melalui proses pemberdayaan.

Teguh (2004) mengemukakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi :

- 1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat menggali peran di dalam pembangunan.
- 3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

2.2 Kondisi Fisik Hutan

2.2.1 Definisi Hutan

Menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pada bab 1 pasal 1, pengertian *hutan* adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai *kawasan hutan*, yaitu sebagai suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Undang-undang tersebut, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dari definisi hutan yang disebutkan, terdapat unsur-unsur yang meliputi :

- a. Suatu kesatuan ekosistem
- b. Berupa hamparan lahan
- c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- d. Mampu memberi manfaat secara lestari.

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai subekosistem global menenpatikan posisi penting sebagai paru-paru dunia (Zain, 1996).

Sedangkan kawasan hutan lebih lanjut dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan, yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dari definisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur-unsur meliputi :

- b. suatu wilayah tertentu
- c. terdapat hutan atau tidak tidak terdapat hutan
- d. ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan
- e. didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Dari unsur pokok yang terkandung di dalam definisi kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. Kemudian, untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor pertimbangan fisik, hidrologi dan ekosistem, maka luas wilayah yang minimal harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30 % dari luas daratan.

2.2.2 Kerusakan Hutan (Deforestasi dan Degradasi)

Selama ini Pemerintah Indonesia lebih menitikberatkan pengelolaan hutan yang mengarah pada pemanfaatan kayu (timber oriented) dibanding pemanfaatan lainnya. Padahal ada banyak manfaat lain dari sumber daya hutan yang belum dihitung maksimal, termasuk dalam menentukan nilai akhir dari satu meter kubik kayu saat dipasarkan (Khan dalam Firkan, 2004). Tentu saja nilai kayu hanyalah sebagian kecil saja dari nilai ekonomi manfaat sumber daya hutan. Di berbagai pelosok Indonesia bisa dilihat wilayah-wilayah yang dahulunya hutan sekarang berubah menjadi lahan-lahan kosong yang terlantar. Hal ini dikarenakan bahwa sumber daya hutan yang dipanen hanya kayunya saja telah merusak hutan dan bahkan menghilangkan manfaat sumber daya hutan lainnya yang mungkin lebih bernilai dari manfaat hasil hutan berupa kayu.

Pengertian kerusakan hutan bisa dibagi menjadi dua istilah yang berbeda tetapi saling terkait satu sama lainnya. Istilah tersebut yaitu deforestasi dan degradasi (Liang dalam Firkan, 2004). Deforestasi diartikan sebagai perubahan total dari hutan dengan cara dibuka atau dikonversi untuk kepentingan non hutan yang menyebabkan kemusnahan, kerusakan sebagian atau seluruh pepohonan yang tidak bisa diperbaiki. Degradasi hutan diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam suatu kelas hutan yang berpengaruh terhadap tegakan dan atau tempat tumbuh khususnya dalam penurunan kapasitas produksi dan kondisi lingkungan.

2.2.3 Analisis Akar Masalah Kerusakan Hutan

Analisa akar masalah adalah cara yang digunakan untuk melihat 'akar' dari suatu masalah atau dengan kata lain untuk melihat permasalahan utama beserta dengan faktor-faktor penyebabnya. (*Modul Studio Perencanaan Desa VII.1*)

Dalam menyusun suatu analisa akar masalah maka ada beberapa tahapan-tahapan pembuatan yang harus dijalankan; (*Modul Studio Perencanaan Desa VII.2-3*)

- Mengidentifikasikan masalah utama (yang perlu dipecahkan),
- Mengidentifikasikan penyebab masalah tersebut (curah pendapat),
- Mengelompokkan sebab-sebab tersebut,
- Mengidentifikasikan tingkatan penyebab (I,II, dan III),
- Mennetukan tujuan dan harapan (keluaran),
- Memprioritaskan penyebab yang paling mendesak,

- Memprioritaskan harapan yang paling efektif, mudah dan relistis untuk dicapai,
- Menyusun rencana kegiatan.

2.2.4 Penentuan Fungsi Kawasan Hutan

Arahan penggunaan lahan atau fungsi kawasan ditetapkan berdasarkan kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan hutan produksi yang berkaitan dengan karakteristik fisik DAS berdasarkan SK Menteri Pertanian No.387, yaitu:

- Kondisi kemiringan lereng
- Jenis tanah dan kepekaannya trhadap erosi
- Curah hujan harian rata-rata

Karakteristik DAS tersebut pada setiap satuan lahan diklasifikasikan dan diberi skor. Penentuan fungsi kawasan ditetapkan menurut hasil dari skor yang sudah dijumlahkan. Pemberian skor untuk tiap-tiap karakteristik DAS menurut kondisi kemiringan lereng, jenis tanah dan kepekaannya terhadap erosi dan curah hujan harian rata-rata dapat dilihat pada tabel 2.1, tabel 2.2 dan tabel 2.3

Tabel 2.3 Skor kemiringan lereng

	Kemiringan Lereng	Nilai Skor
Kelas 1:	0-8 % (datar)	20
Kelas 2:	8-15 % (landai)	40
Kelas 3:	15-25 % (agak curam)	60
Kelas 4:	25-45 % (curam)	80
Kelas 5:	≥ 45 % (sangat curam)	100

Sumber: SK Menteri Pertanian No.387

Tabel 2.4 Skor Jenis Tanah

Kelas 1: Aluvial, Planosol, Hidromorf kelabu, Laterik (tidak peka)	15
Latarik (tidak naka)	
Laterik (tidak peka)	
Kelas 2: Latosol (agak peka)	30
Kelas 3: Tanah hutan coklat, tanah mediteran	45
(kepekaan sedang)	
Kelas 4: Andosol, laterik, grumosol, podsol,	60
podsolic (peka)	
Kelas 5: Regosol, litosol, organosol, renzina (sangat	75
peka)	

Sumber: SK Menteri Pertanian No.387

Tabel 2.5 Skor Jenis Tanah

	Kemiringan Lereng	Nilai Skor
Kelas 1:	≤ 13.6 mm/hari (sangat rendah)	10
Kelas 2:	13.6-20.7 Mm/hari ()	20
Kelas 3:	20.7-27.7 mm/hari ()	30
Kelas 4:	27.7-34.8 mm/hari ()	40
Kelas 5:	≥ 34.8 mm/hari ()	50

Sumber: SK Menteri Pertanian No.387

Penetapan lahan setiap satuan lahan kedalam suatu kawasan fungsional dilakukan dengan menjumlahkan nilai skor ketiga faktor tersebut dengan mempertimbangkan keadaan setempat. Dengan cara demikian, dapat dihasilkan kawasan lindung, kawasan penyangga dan kawasan budidaya.

Satuan lahan dengan jumlah skor ketiga faktor fisiknya sama dengan atau lebih besar dari 175 dan memenuhi salah satu atau beberapa syarat di bawah ini:

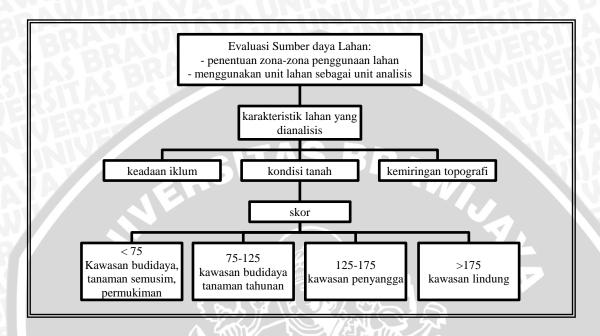
- Mempunyai kemiringan lereng > 45%
- Tanah dengan klasifikasi sangat peka terhadap erosi dan mempunyai kemiringan lereng > 15%
- Merupakan jalur pengamanan aliran sungai, sekurang-kurangnya 100m dikiri-kanan alur sungai.
- Merupakan pelindung mata air, yaitu 200m dari pusat mata air.
- Berada pada ketinggian 2000m dpl
- Guna kepentingan khusus dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan lindung

Satuan lahan dengan jumlah skor ketiga faktor fisik antara 125-175 serta memenuhi kriteria umum sebagai berikut:

- Keadaan fisik areal memungkinkan untuk dilakukan budidaya pertanian secara ekonomis
- Lokasinya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan penyangga
- Tidak merugikan dari segi ekologi atau lingkungan hidup.

Kriteria kawasan budidaya tanaman tahunan yaitu mempunyai satuan lahan dengan jumlahskor ketiga faktor fisik 75-124 serta sesuai untuk dikembangkan usaha tani tanaman tahunan (tanaman perkebunan, tanaman industri). Selain itu areal tersebut harus memenuhi kriteria umum untuk kawasan penyangga. Sedangkan kriteria kawasan budidaya tanaman semusim atau permukiman yaitu mempunyai satuan lahan dengan kriteria seperti dalam penetapan kawasan budidaya tanaman tahunan dengan jumlah skor kurang dari 75

serta terletak ditanah milik, tanah adat dan tanah negara yang seharusnya dikembangkan usaha tani tanaman semusim. Skema evaluasi sumberdaya lahan menurut Menteri Pertanian no 387/KPT/UM/1980 bisa dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2.2Skema Evaluasi Sumber Daya Lahan

2.2.5 Pembagian hutan Produksi berdasarkan jenisnya

Dasar Penetapan batas hutan produksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 83/KPTS/UM/8/1981:

- a. Parameter yang diperhatikan dan diperhitungkan dalam penetapan hutan produksi adalah lereng (kemiringan) lapangan, jenis tanah, dan intensitas hujan;
- b. Untuk keperluan penilaian fisik wilayah, setiap parameter tersebut dibedakan dalam 5 tingkatan (kelas) yang diuraikan dengan tingkat kepekaannya terhadap erosi. Makin tinggi nilai kelas parameter makin tinggi pula tingkat kepekaannya terhadap erosi;
- c. Skoring fisik wilayah ditentukan oleh total nilai kelas ketiga parameter setelah masing-masing nilai kelas parameter dikalikan dengan bobot 20 untuk parameter lereng, bobot 15 untuk parameter jenis tanah, dan bobot 10 untuk parameter intensitas hujan (lihat tabel 1, 2 dan 3);

- d. d.Berdasarkan hasil penjumlahan skoring ketiga parameter tersebut yaitu lereng, jenis lahan, dan intensitas hujan suatu wilayah hutan dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai:
 - Hutan Produksi Tetap jika memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai < 125; tidak merupakan kawasan lindung; serta berada di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi lainnya;
 - Hutan Produksi Terbatas jika memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai 125 175; tidak merupakan kawasan lindung; mempunyai satuan bentangan
 sekurang-kurangnya 0,25 Ha (pada ketelitian skala peta 1 : 10.000); serta bisa
 berfungsi sebagai kawasan penyangga;
 - Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi jika memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai >175; tidak merupakan kawasan lindung; dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan kegiatan budi daya lainnya; serta berada di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi lainnya.

Tabel 2.6 Definisi Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan Fungsinya

Jenis	Definisi
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan
Terbatas	produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya
	dapat dengan tebang pilih tanam
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan
Tetap	produksi tetap dimana eksploitasinya dapat
	dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan yang bilamana diperlukan dapat
Konversi	dialihgunakan

Sumber: Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.41/PRT/M/2007)

2.3 Pengelolaan Bersama (Collaborative Management)

Sub-bab kedua ini menguraikan tentang pengelolaan bersama yang meliputi definisi dan bentuk-bentuk pengelolaan bersama, unsur-unsur dalam pengelolaan bersama (partisipasi, kemitraan dan desentralisasi), aspek-aspek penting untuk pengelolaan bersama yang efektif, kelembagaan lokal dalam pengelolaan bersama dalam konteks perencanaan.

2.3.1 Pengertian Pengelolaan Bersama

Pada dasarnya, pengelolaan bersama akan selalu merefleksikan bentuk-bentuk kemitraan dan partisipasi. Suatu pengelolaan bersama antara masyarakat lokal setempat dan pemerintah akan lebih kuat bila dibandingkan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh salah satu unsur saja. Pengelolaan bersama ini harus dirancang spesifik karena melibatkan masyarakat lokal dengan pengetahuan yang mereka miliki. Beberapa ahli memberikan pengertian pengelolaan bersama tersebut yang dirangkum dalam Tabel 2.4 berikut ini di halaman selanjutnya.

Tabel 2.7 Beberapa Pengertian Pengelolaan Bersama

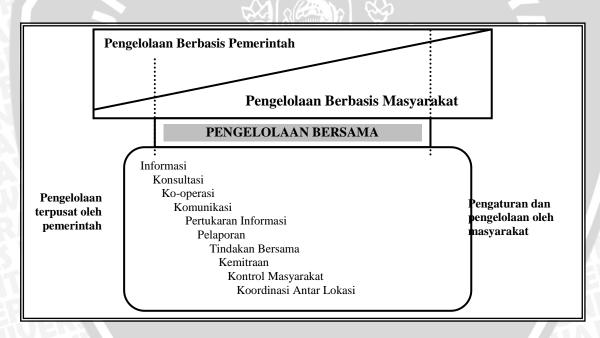
Pendapat	Pengertian
Pinkerton	 Pengelolaan bersama biasanya meliputi pembagian kekuasaan yang sesungguhnya antara pengelola pada tingkat lokal dan kanton pemerintah, sehingga masing-masing dapat mengontrol penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain.
Berkes et.al	 Pengelolaan bersama didefinisikan sebagai pembagian kekuasaar dan tanggung jawab antara pemerintah dan pengguna sumber daya lokal.
	 Terdapat berbagai tingkatan pengelolaan bersama, mulai dari sekedar kesertaan penduduk lokal dalam pencarian data oleh pemerintah sampai tingkatan penduduk lokal memegang keseluruhan kekuasaar dan tanggung jawab.
Mitchell	 Pengelolaan bersama merupakan suatu pendekatan yang menyatukar sistem pengelolaan lokal dan negara.
	 Pada tingkat negara, pengelolaan dilakukan oleh kantor pemerintah yang diberi wewenang khusus dan resmi untuk bidang-bidang pengelolaan sumber daya tertentu. Bentuk pengelolaannya selalu dicirikan sangat terpusat dan hirarki yang kebijakannya ditentukar oleh kantor pusat dan kantor lokal yang menerapkannya Pelaksanaannya didasarkan pada otoritas yang diberikan berdasar hukum dan peraturan. Sebaliknya, pada tingkat lokal didasarkan atas pengetahuan lokal tradisi budaya, adat-istiadat, tanpa aturan dan hukum resmi Pendekatannya tidak terpusat. Semua keputusan ditentukan berdasar kesepakatan, sementara pelaksanaannya didasarkan atas sanksi sanksi sosial.
Rivera	 Pengelolaan bersama adalah suatu jalan tengah antara pengelolaan oleh pemerintah yang mengarah pada pencapaian efisiensi dar keadilan serta pengelolaan oleh masyarakat yang mengarah pada menentukan dan mengatur diri sendiri serta aktif berpartisipasi.
	 Oleh karena itu, kemitraan harus dijalankan, selalu diperkuat dar didefinisikan ulang pada setiap waktu dalam tahapan kegiatar pengelolaan bersama. Namun bagaimana pun juga kemitraan in sangat bergantung pada lingkungan kebijakan politik dan hukun yang ada pada suatu negara, adanya dukungan politik dar pemerintah untuk tindakan-tindakan dan inisiatif-inisiati masyarakat, serta kemampuan organisasi masyarakat untuk menjad partner pemerintah

Pendapat	Pengertian	
Pomeroy	Pengelolaan bersama adalah suatu strategi pengelolaan yang	
	fleksibel pada suatu forum tertentu untuk menuangkan partisipasi,	
	membuat aturan-aturan, mengelola konflik, berbagi tanggung jawab,	
	kepemimpinan, dialog, membuat keputusan, berbagi pengetahuan,	
	saling belajar dan mengembangkan diri di antara para pengg	
	sumber daya alam, stakeholders dan pemerintah.	

Sumber: Pinkerton; Berkes et al; Mitchel; Rivera; Pomeroy dalam Firkan, 2004

2.3.2 Bentuk-Bentuk Pengelolaan Bersama

Unsur-unsur kemitraan dan partisipasi sangat mewarnai bentuk-bentuk pengelolaan bersama. Berkes dan Pomeroy dalam Firkan (2004) menyatakan bahwa cakupan pengelolaan bersama itu meliputi pengaturan kemitraan dan tingkatan pembagian kekuasaan serta menggabungkan sistem pengelolaan masyarakat lokal setempat (aturan informal, tradisional, adat istiadat) dengan sistem pengelolaan oleh negara. Bentuk-bentuk pengelolaan bersama ini bisa dilihat pada Gambar 2.3 di halaman selanjutnya.



Gambar 2.3 Hirarki Pengelolaan Bersama Sumber : Berkes, dalam Firkan (2004)

Bentuk-bentuk pengelolaan bersama tersebut di atas berdasarkan hirarki-nya berada di antara dua kutub yang terpisah yaitu bentuk pengelolaan secara terpusat oleh pemerintah dan bentuk pengelolaan atau pengaturan diri sendiri oleh masyarakat. Bila pengelolaan dilakukan masing-masing oleh pemerintah atau oleh masyarakat secara terpisah, maka pengelolaan bersama tidak akan terwujud. Untuk mewujudkan pengelolaan

bersama maka harus ada pembagian tanggung jawab, otoritas dan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat. Penerapan berbagai macam bentuk hirarki pengelolaan bersama sangat tergantung pada karakter khusus atau unik suatu tempat beserta masyarakatnya.

Berdasarkan hierarkinya, bentuk pengelolaan bersama berawal dimana otoritas pemerintah sangat kuat (bentuk pelaporan) hingga bentuk dimana pemerintah mulai berkurang otoritasnya, sementara masyarakat lokal setempat semakin besar peranannya (bentuk koordinasi antar lokasi). Pada bentuk "pelaporan" pemerintah hanya melaporkan pada masyarakat lokal setempat tentang kebijakan-kebijakan yang diberlakukan atas sumberdaya. Sementara pada bentuk "kontrol masyarakat" atau "koordinasi antar lokasi" masyarakat lokal setempat melaksanakan seluruh fungsi pengelolaan dan hanya melaporkan pada pemerintah. Bentuk pengelolaan bersama yang sejajar adalah dimana pemerintah dan masyarakat memiliki peranan yang sebanding yaitu "komunikasi", "pertukaran informasi", "tindakan bersama" dan "kemitraan".

2.3.3 Unsur-Unsur Dalam Pengelolaan Bersama

Sebelumnya di bagian atas sempat disinggung bahwa di dalam pengelolaan bersama terdapat unsur-unsur partisipasi dan kemitraan. Pada bagian ini akan diulas mengenai partisipasi dan kemitraan secara singkat. Unsur lainnya dalam pengelolaan bersama yang akan dibahas dalam sub bab ini adalah mengenai desentralisasi.

2.3.3.1 Partisipasi dan Kemitraan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, bisa diwujudkan dengan membangun suatu kemitraan di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap sumber daya alam yang akan dikelola. Alasan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam terdiri atas banyak hal, namun yang terpenting menurut Mitchell (1997) adalah untuk (1) merumuskan persoalan dengan lebih efektif, (2) mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah, (3) merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan dapat diterima, dan (4) membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian sehingga memudahkan penerapan. Namun perlu juga disadari bahwa

pendekatan partisipatif ini mempunyai kekurangan yaitu memerlukan waktu yang relatif lebih lama pada tahap perencanaan dan analisis.

Arnstein (1969) mengidentifikasi tingkat pelibatan masyarakat dalam berbagai tingkatan, mulai dari tanpa partisipasi sampai kontrol masyarakat sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.2 di bawah ini. Berbagai keterlibatan partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan bisa dipetakan dengan tingkatan partisipasi tersebut. Banyak orang yang mengatakan bahwa kehadiran warga masyarakat dalam suatu rapat adalah suatu bentuk partisipasi mereka. Namun setelah ditelusuri ternyata keikutsertaan mereka tersebut telah diimingi-imingi sejumlah uang. Mungkin ini yang disebut partisipasi semu.

Tabel 2.8 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

No	Tingkatan Partisipasi	Lingkup Partisipasi	Derajat Pembagian Wewenang
1 2	Manipulasi (manipulation) Terapi (therapy)	Tercatat sebagai anggota panitia Pendidikan terhadap masyarakat	Tidak ada partisipasi
3 4 5	Informasi (information) Konsultasi (consultation) Penenteraman (placation)	Hak/pilihan masyarakat dikenali Pendapat masyarakat didengar tetapi tidak harus diperhatikan Saran masyarakat diterima tetapi belum tentu ditindaklanjuti	Tingkat wewenang dihargai (degrees of tokenism)
6 7 8	Kemitraan (partnership) Delegasi wewenang (delegated power) Kontrol Masyarakat (citizen control)	Timbal balik dirundingkan Masyarakat mengelola sebagian atau seluruh program Kendali oleh masyarakat	Pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang dengan masyarakat

Sumber: Arnstein [1969]

Tingkatan nomor 1 dan 2 adalah tingkatan terendah yang bisa diklasifikasikan sebagai bukan partisipasi masyarakat karena masyarakat diikutsertakan dalam suatu kegiatan hanya sebagai obyek belaka. Tingkatan nomor 3, 4 dan 5 adalah klasifikasi adanya penghargaan terhadap masyarakat, di mana masyarakat sudah diberi informasi, diajak bicara dan berdiskusi namun masyarakat belum diajak memutuskan. Tingkatan nomor 6, 7 dan 8 adalah suatu tingkatan yang dinamakan partisipasi itu sendiri, di mana masyarakat sudah ikut terlibat dalam memutuskan suatu hal dengan adanya pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dengan pemerintah.

Sesungguhnya antara partisipasi masyarakat dan kemitraan ini satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisah begitu saja. Mitchell dalam Firkan (2004) memberikan pengertian kemitraan sebagai berikut :

"Sebuah kemitraan (partnership) adalah pengaturan yang saling disepakati antara dua atau lebih publik, organisasi swasta, lembaga swadaya masyarakat atau pemerintah, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan bersama, atau untuk merealisasikan kegiatan yang disepakati bersama demi lingkungan dan masyarakat."

Antara partisipasi dan kemitraan mempunyai perbedaan mendasar. Partisipasi tidak terikat oleh suatu kontrak perjanjian, tetapi lebih merupakan suatu kesukarelaan, tidak ada ketergantungan dan faktor pengikatnya adalah komitmen. Untuk mencapai keberhasilan suatu tindakan partisipasi, maka akan lebih baik jika masyarakat ditempatkan sebagai mitra (partner). Dengan kata lain, kemitraan yang hendak dibangun seringkali meleset sasarannya dan tidak berjalan sempurna karena tidak adanya partisipasi masyarakat dalam arti yang lebih baik. Selanjutnya Mitchell menjelaskan elemen-elemen kunci untuk mencapai keberhasilan partisipasi dan kemitraan. Pada Tabel 2.6 di bawah ini diperlihatkan elemen-elemen kunci tersebut.

Tabel 2.9 Elemen-Elemen Keberhasilan Partisipasi dan Kemitraan

No	Elemen Kunci	Penjelasan
1	Kecocokan antar peserta	Kecocokan ini selalu didasarkan atas penghargaan dan kepercayaan, bahkan ketika harapan dan kebutuhan yang berbeda muncul. Dengan adanya saling menghargai dan saling percaya, perbedaan akan selalu dapat diselesaikan dan
		memperluas pandangan setiap peserta.
2	Keuntungan untuk semua peserta	Kemitraan yang berjalan sempurna dan langgeng, akan sulit terwujud bilamana tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh secara nyata oleh setiap pesertanya dan juga tidak adanya pembagian keuntungan secara adil
3	Wewenang dan	Perlunya dikembangkan pembagian kekuasaan, wewenang
	keterwakilan yang	dan keterwakilan yang seimbang di antara para peserta.
	sederajat	Beberapa peserta mungkin hanya mempunyai sedikit sumber daya atau kapasitas dibanding yang lain sehingga perlu disusun langkah-langkah tertentu agar semua peserta bisa ikut terlibat.
4	Mekanisme komunikasi	Adanya mekanisme komunikasi yang baik harus dibangun secara internal di antara para peserta yang terlibat maupun secara eksternal dengan pihak luar
5	Penyesuaian.	Karena kondisi selalu tidak pasti dan adanya proses perubahan yang cepat dalam pengelolaan sumber daya, maka harus ada penyesuaian yang fleksibel dan selalu belajar dari pengalaman.
6	Integritas, kesabaran dan	Tanpa adanya ketiga hal ini hambatan selalu akan timbul
	ketekunan semua peserta	sehingga rasa frustasi bisa menghinggapi perasaan semua peserta, yang berakibat pada proses yang lambat.

Sumber: diadaptasi dari Mitchell [1997: 257]

2.3.4 Aspek-Aspek Penting Dalam Pengelolaan Bersama

Beberapa aspek penting perlu diperhatikan dalam mewujudkan pengelolaan bersama yang efektif. Tabel 2.7 di bawah ini adalah modifikasi aspek-aspek tersebut untuk pengelolaan hutan.

Tabel 2.10 Aspek-Aspek Penting dalam Pengelolaan Bersama

o	Aspek	Penjelasan
	Pra-kondisi yang paling diinginkan	 Adanya krisis nyata dengan langkanya atau kerusakan sumber daya alam, misalnya hilangnya spesies ikan atau kerusakan hutan. Kemauan pengguna sumber daya alam lokal untuk ikut menyumbang secara finansial atau pun menerima berbagai bentuk bantuan lain untuk merehabilitasi sumber daya maupun tugas-tugas pengelolaan lainnya. Terbukanya kesempatan untuk bernegosiasi atau mengenalkan satu bentuk pengelolaan bersama untuk salah satu jenis sumber daya, yang kemudian dapat berkembang untuk sumber daya lain.
	Kondisi dan mekanisme yang paling diinginkan	
	Cakupan spasial yang terbaik	 Mencakup areal yang relatif tidak terlalu luas, seperti pada suatu wilayah aliran sungai, yang mana keuntungannya dapat secara langsung diketahui dan dihargai oleh mereka yang terlibat. Jumlah peserta dan komunitas tidak terlalu besar sehingga komunikasi yang efektif dapat dikembangkan. Birokrasi pemerintah cukup kecil dan efisien, serta jelas wewenangnya.
	Mempunyai kelompok yang siap diajak melakukan pengelolaan bersama	 Kelompok-kelompok lokal sudah cukup solid

o Aspek	Penjelasan
MINERADERSO	menerapkan sangsi.
Manusia	 Kerja sama dapat ditingkatkan oleh sesam mereka yang menggunakan sumber-sumber daya alam secara bersama. Komitmen dapat dikembangkan antar mereka terutama untuk berbagi keuntungan da kerugian yang akan didapat melalu pengelolaan bersama. Terdapat mekanisme negosiasi yan disepakati, agar berbagai konflik dapa diselesaikan, sementara alokasi sumber daya alam dibagikan dengan adil. Mekanisme negosiasi juga dikembangka antara mereka yang langsung maupun tida langsung terlibat dalam pengelolaan suat sumber daya alam secara bersama. Muncul kemauan atau kesepakatan untu saling membagi informasi dan data tentan sumber daya alam yang dikelola bersama. Kepercayaan dan penghargaan tumbuh antar pengguna sumber daya alam dan apara pemerintah, yang memungkinkan pemerinta menyerahkan lebih banyak kekuatan pad penduduk lokal. Terdapat seseorang atau sekelompok oran yang mempunyai dedikasi tinggi untu mengembangkan hubungan dalar pengelolaan bersama

2.3.5 Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Bersama

Pengelolaan bersama adalah suatu perpaduan pengelolaan antara tingkat lokal dan negara dengan dilandasi berbagi wewenang dan tanggung jawab secara bersama. Pengertian lokal sebagai satu tingkatan (local level) seringkali disamakan dengan tingkatan masyarakat (community level). Di dalam pengelolaan hutan, untuk menentukan lembagalembaga mana yang seharusnya terlibat dan bagaimana susunan kelembagaannya (institutional arrangement) adalah tidak mudah. Menurut Uphoff dalam Firkan (2004) hal tersebut harus dilihat secara jeli karena penting sekali untuk mengevaluasi dan mempromosikan model pengembangan kelembagaan, dalam hal ini termasuk pengembangan kelembagaan lokal (mode of local institutional development). Terminologi kelembagaan lokal yang dimaksud adalah terkait dengan tingkatan aktivitas dan pengambilan keputusan lokal.

Namun untuk mewujudkan upaya pengembangan kelembagaan lokal tersebut harus mengkaji beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan pembentuknya. Beberapa

hal yang harus dikaji pada dasarnya merupakan karakteristik interaksi antara sumber daya hutan dengan para penggunanya, yang terdiri dari pembatasan sumber daya dan penggunanya (boundedness of resources and users), distribusi biaya dan manfaat (distribution of costs and benefits), karakteristik sumber daya (characteristic of resources) dan karakteristik penggunanya (characteristic of the users) serta lembaga lokal untuk pengelolaan bersama. Kajian pada aspek-aspek tersebut akan menjadi masukan berharga dan penting bagi arahan pembentukan dan pengembangan suatu kelembagaan lokal.

2.3.5.1 Pembatasan Sumber Daya Dan Penggunaannya

Dalam pengelolaan sumber daya alam dari segi pembatasan sumber daya dan penggunanya, dapat ditelaah seberapa jauh : (a) pengguna (resource user-manager) merupakan seperangkat orang yang dapat diidentifikasikan dan dapat ditentukan batasannya; dan (b) mereka mempunyai struktur kewenangan yang mapan dan efektif yang keabsahannya diakui dan diterima (Uphoff, dalam Firkan,2004). Dalam banyak kasus pengelolaan sumber daya alam, the user-manager merupakan seperangkat orang yang sulit didefinisikan, bukan merupakan kelompok atau masyarakat dan tanpa ada mekanisme pembuatan atau pelaksanaan keputusan.

Selain itu harus juga diketahui sampai seberapa jauh para pengguna (the user-manager) mengenal dan dapat memprediksi : (a) jumlah dan kualitas sumber daya yang dikelola, dan (b) ketersediaan sumber daya dalam waktu dan di tempat tertentu (Uphoff, 1986). Ketika jumlah dan ketersediaan sumber daya dapat diketahui, kemungkinan pengelolaan yang efektif dapat meningkat cepat dan lebih mungkin dilakukan oleh lembaga-lembaga yang rutin (routinized institutions).

2.3.5.2 Distribusi Biaya Dan Manfaat

Perkiraan biaya dan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam akan bervariasi menurut cakupan waktu dan areal geografis. Perkiraan ini dipengaruhi oleh sampai seberapa jauh biaya dan manfaat tersebut dapat diraba (tangible) dan dapat dimengerti (perceptible), serta sampai sejauh mana biaya dan manfaat tersebut dipikul oleh orang yang sama. Pertimbangan-pertimbangan ini mempengaruhi kelayakan pengembangan kelembagaan lokal yang dipilih (Uphoff, 1986). Terdapat empat dimensi biaya dan manfaat pengelolaan sumber daya yang diidentifikasi bisa mempengaruhi keterlibatan para

pengguna atau calon pengguna potensial, yaitu sebagai berikut pada Tabel 2.7 di halaman selanjutnya.

Tabel 2.11 Empat Dimensi Biaya dan Manfaat

No	Dimensi	Biaya dan Manfaat
	Temporal (temporal	A. Manfaat bertambah dengan segera, atau
1	dimensions)	B. Manfaat bertambah setelah kurun waktu yang lama
2	Spasial (spatial	A. Manfaat bertambah pada lokasi tersebut, atau
2	dimension)	B. Manfaat bertambah sedikit
2	Kemampuan untuk	A. Manfaat cukup jelas, atau
3	Diraba (tangibility)	B. Manfaat relatif sulit didefinisikan
	Distribusi	A. Manfaat bertambah pada orang-orang yang
4		menanggung biaya pengelolaan, atau
	(distribution),	B. Manfaat bertambah pada orang lain

Sumber: Uphoff [1986]

Analisis berdasarkan empat dimensi tersebut beranggapan bahwa dalam mengelola sumber daya alam memerlukan banyak biaya yang meliputi investasi tenaga kerja dan dana atau nantinya dibiarkan tidak dimanfaatkan saat ini untuk melindungi kelestariannya demi masa depan. Lembaga-lembaga lokal berikut kelembagaannya akan lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya alam jika keuntungannya datang dengan segera, bertambah pada lokasi yang sama, dapat dikenali jelas, dan pada orang-orang yang menanggung biaya pengelolaan. Kondisi yang sebaliknya sangat tidak mungkin untuk mengembangkan kelembagaan lokal bilamana keuntungannya lambat, manfaatnya sedikit, kurang jelas dikenali dan manfaat bertambah pada orang lain.

2.3.5.3 Karakteristik Sumber Daya

Sifat sumber daya yang akan dikelola mempengaruhi bagaimana pilihan kelembagaan yang diinginkan (Uphoff, dalam Firkan, 2004). Terdapat tiga perbedaan karakteristik sumber daya, yaitu kemampuan sumber daya untuk diperbaharui (resource renewabilitiy), musim (seasonality), dan persepsi masyarakat terhadap sumber daya (perception of resource). Ketiga karakteristik sumber daya ini perlu dipertimbangkan agar sumber daya yang ada dapat dikelola sesuai dengan pilihan kelembagaannya.

Karakteristik sumber daya penting dipersepsikan oleh penggunanya. Masyarakat kebanyakan umumnya secara sepihak menentukan atau menilai apakah suatu sumber daya itu *renewable* atau tidak, juga apakah suatu sumber daya itu sebagai barang pubik (*public goods*) atau barang privat (*private goods*).

2.3.5.4 Karakteristik Pengguna

Dalam uraian pembatasan sumber daya dan penggunanya telah dijelaskan mengenai apakah pengguna merupakan seperangkat orang tertentu dan memiliki struktur kewenangan yang diakui atau tidak. Menurut Uphoff dalam Firkan (2004), sebagai tambahan pertimbangan untuk menentukan alternatif kelembagaan adalah saling ketergantungan (interdependence), homogenitas (homogenity), dan tradisi (tradition).

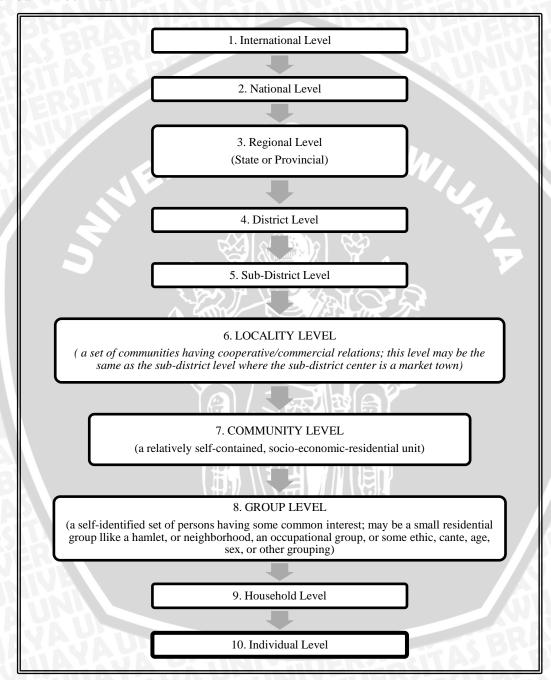
Sampai tingkat tertentu, para pengguna sumber daya tergantung pada pihak atau pengguna yang lain untuk mempertahankan keberadaannya. Berkenaan dengan hal tersebut, upaya-upaya untuk membuat berperannya lembaga-lembaga lokal lebih besar. Namun saling ketergantungan di antara para pengguna hutan tampaknya tidak terlalu tinggi, sehingga beroperasinya dan semakin berperannya lembaga-lembaga lokal kurang memperoleh dorongan. Akibatnya kadang-kadang, terlihat tidak adanya hubungan kepentingan di antara mereka.

Begitu pula halnya dengan homogenitas pemanfaat, pengelolaan hutan akan jauh lebih mudah dan sederhana jika penggunanya homogen dan bisa mengakibatkan keputusan-keputusan yang diambil lebih seragam. Sebagai contoh, tidak ada suatu jaminan pasti bahwa pemerintah daerah akan (mungkin) mengalokasi dan mengatur sumber daya secara optimal jika terdapat konflik internal. Dalam kasus ini, kelembagaan lokal lebih memungkinkan untuk mengalokasi dan mengatur sumber daya. Hal tersebut mengingat konflik yang muncul atas penggunaan sumber daya alam mungkin relatif kurang muncul karena di antara para penggunanya telah tertanam perasaan terikat oleh suatu ikatan kekerabatan (kinship), pekerjaan (occupation) dan lain-lain.

Seringkali ada anggapan bahwa upaya untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan tanpa konflik harus diterapkan oleh para pengguna hutan yang hidup dalam *social setting* dengan kearifan tradisional tertentu. Ironisnya anggapan tersebut seringkali tidak tepat. Seringkali penurunan kapasitas sumber daya diakibatkan oleh tidak tepatnya pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat setempat. Kalau ditelusuri lebih jauh hal ini seringkali berkaitan dengan menurunnya fungsi atau pengaruh lembaga-lembaga tradisional setempat beserta pemimpin-pemimpinnya dalam kehidupan masyarakat.

2.3.5.5 Lembaga Lokal Untuk Pengelolaan Bersama

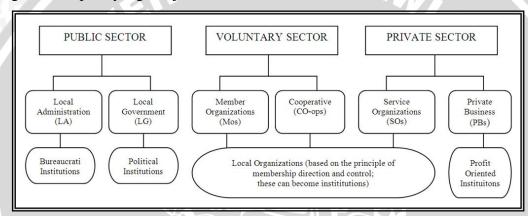
Dalam kasus ini, terminologi lembaga lokal seringkali dikaitkan dengan tingkatan aktivitas dan pengambilan keputusan sebagaimana yang disusun oleh Uphoff (1986) pada Gambar 2.4 berikut.



Gambar 2.4 Tingkatan Aktivitas dan Pengambilan Keputusan Sumber : Uphoff [1986]

Sebagaimana digambarkan di atas, maka apa yang disebut sebagai tingkatan lokal adalah sekurang-kurangnya mencakup tiga tingkatan (angka 6, 7 dan 8), yang barangkali dalam konteks Indonesia setingkat kecamatan ke bawah. Angka-angka lainnya tidak cukup lokal karena perbedaan yang muncul sudah menyangkut kewenangan dan unit pengambilan keputusan serta aktivitas yang terlibat relatif besar.

Sementara itu lembaga-lembaga lokal di sini dimaksudkan mencakup lembaga pemerintah (public sector) maupun lembaga swasta (private sector), yang aktivitasnya dihubungkan oleh intermediate sector, seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan. Esman dan Uphoff (dalam Uphoff, 1986) mengklasifikasikan enam kategori utama dari lembaga lokal seperti yang disajikan Gambar 2.3.



Gambar 2.5 Rangkaian Kesatuan Lembaga Lokal Berdasarkan Sektor Sumber: Uphof, 1986

Local Administration (LA), yaitu instansi-instansi di daerah yang merupakan aparat departemen pemerintah pusat, yang bertanggung jawab kepada atasan langsung (accountable to bureaucratic superiors). Local Government (LG), yaitu badan-badan perwakilan atau yang disetujui untuk menangani tugas-tugas pembangunan dan pengaturan, yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah (accountable to local residents).

Membership Organizations (MOs), merupakan local self-help associations yang anggota-anggotanya mungkin menangani :

- (a) berbagai macam tugas (*multiple tasks*), seperti perkumpulan pembangunan daerah atau komite pembangunan desa, dan sebagainya.
- (b) tugas-tugas khusus (*specific tasks*), seperti perkumpulan petani pemakai air (P3A), kelompok tani hutan (KTH), dan sebagainya.

(c) kebutuhan-kebutuhan (*needs*) anggota yang memiliki karakteristik atau kepentingan yang sama, seperti kelompok arisan ibu-ibu, perkumpulan pengajian, dan sebagainya.

Cooperatives (CO-ops), yaitu semacam organisasi lokal yang menyatukan sumber daya ekonomi anggota-anggotanya untuk memperoleh keuntungan, seperti koperasi pasar, koperasi kredit, koperasi pedagang, kelompok pengguna dan sebagainya. Service Organizations (SOs), yaitu organisasi lokal yang dibentuk terutama untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang bukan anggota, seperti lembaga-lembaga pelayanan, palang merah dan sebagainya. Private Business (PBs), yaitu cabang-cabang atau kelompok pelaksana independen dari perusahaan ekstra lokal yang bergerak di sektor pabrik, produksi, jasa, ataupun perdagangan.

Setiap kategori di atas mempunyai keunggulan dan kelemahan tersendiri, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Setiap kategori tersebut merupakan rangkaian kesatuan (continuum) yang merentang dari sektor publik sampai sektor swasta. Jadi yang termasuk sebagai lembaga lokal mencakup MOs, CO-ops dan SOs. Sedangkan LA dan LG tidak termasuk karena merupakan bagian-bagian dari lembaga lainnya (departemen pemerintah pusat dan dinas-dinas pemerintah daerah), yang mana mempunyai kekuatan hukum dan sumber daya di balik kedudukan mereka. Begitu juga dengan PBs yang meskipun sama-sama menghasilkan keuntungan bagi orang-orang di luar organisasinya (seperti SOs), tetapi orang-orang ini tidak sekaligus dianggap sebagai pelanggan, dan tidak memiliki hak untuk ikut menentukan aktivitas organisasi.

Uphoff (1986) menyebutkan bahwa jenis lembaga-lembaga lokal seperti apa yang efektif dan *sustainable* bagi pengelolaan sumber daya alam tergantung dari, (a) sifat sumber daya yang hendak dikelola, dan (b) komposisi masyarakat pengguna sumber daya tersebut, khususnya mengenai apakah mereka merupakan masyarakat yang dapat diidentifikasikan (*identifiable community*). Selanjutnya Uphoff mengatakan pula, bahwa pada tingkat tertentu di mana sumber daya dan penggunanya dapat dibatasi (dalam artian dapat diidentifikasi dan jelas batasannya), maka tugas-tugas pengelolaan akan lebih mudah dan lebih dapat dipertanggung jawabkan jika dikerjakan oleh lembaga-lembaga lokal. Untuk konteks pengelolaan bersama yang melibatkan pemerintah, badan-badan yang mempunyai kewenangan dan inklusif seperti *local government* (LG) menjadi lebih efektif dalam situasi ketika sumber daya dapat ditentukan dan dibatasi dari pengguna-penggunanya.

2.4 Analisis Dan Alternatif Strategi Pengelolaan Hutan

2.4.1 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai factor secara sistemantis untuk memformulasikan trategi suatu kegiatan. Analisis SWOT adalah singkatan dari Lingkungan Internal Strenghts dan Weaknesses serta Lingkungan Eksternal Opportunities danThreats (Rangkuti, 2000).

Analisis SWOT disebut juga analisis situasi yang digolongkan kedalam factor internal (kekuatan dan kelemahan) atau dikatakan sampak secara tindak langsung dan factor eksternal (peluang dan ancaman) atau dikatakan dampak secara langsung. Kedua factor tersebut memberikan dampak positif yang berasal dari peluang dan kekuatan dampak negatif yang berasal dari ancaman dan kelemahan. Dengan menggunakan matrik dapat memberikan bobot dan skor pada parameter yang telah ditentukan sehingga diperoleh nilai. Nilai akan memberikan kesimpulan tentang pengaruh kegiatan terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir yang optimal yang dilanjutkan dengan penyusunan konsep strategi.

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) suatu kegiatan umum secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats) dan untuk lebih jelasnya dapat pada Tabel 30 berikut ini :

Tabel 2.12 Matrik Analisis SWOT

		Internal		
	7	Strength	Weakness	
Eksternal	Oportunity	Strategy SO	Strategy WO	
211000111111	Threat	Strategy ST	Strategy WT	

Sumber: Rangkuti, 2000

Untuk pengembangan kawasan pulau-pulau, analisis potensi dan trategi pengembangan dilakukan dengan analisis SWOT ((Strengths, Opportunities, Weaknesses dan Threats). Analisis ini dilakukan dengan menerapkan criteria kesesuaian dengan menggunakan data kuantitatif, maupun dengan deskripsi keadaan. Dari hasil analisis diatas,

dapat dihasilkan pembatasan wilayah observasi dan peruntukan untuk setiap jenis peruntukan/usaha yang akan dikembangkan serta tingkat teknologi yang layak untuk perairan tersebut.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis SWOT ini adalah :

1. Identifikasi Kekuatan/Kelemahan/Peluang/Ancaman

Dari potensi sumberdaya dan tingkat pembangunan wilayah dapat diidentifikasi beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pembangunan pulaupulau kecil.

2. Analisis SWOT

Dalam menentukan strategi yang terbaik dilakukan pemberian bobot (nilai) terhadap tiap unsure SWOT berdasarkan tingkat kepentingan dan kondisi kawasan. Setelah masing-masing unsure SWOT dianalisis dengan pengolahan data dengan Expert Choice versi 9.0, unsur-unsur tersebut dihubungkan keterkaitannya untuk memperoleh beberapa alternatif strategi (SO, ST, WO, WT), yang merupakan prioritas alternatif strategi yang diprioritaskan untuk dilakukan seperti pada table 31 berikut.

Tabel 2.13 Pembobotan Tiap Unsur SWOT

Strength	bobot	Weakness	bobot	Opportunity	bobot	Threat	bobot
S1		W1	$II. \mathcal{N}$	01	A L	T1	
S2		W2	7/1/2	O2		T2	
S3		W3		O3		T3	
Sn		Wn		On		Tn	

Ket: Pembobotan dilakukan melalui pengolahan data dengan AHP

Sumber: Rangkuti, 2000

3. Alternatif Strategi Hasil Analisis SWOT

Alternatif strategi pada matriks hasil analisis SWOT dihasilkan dari penggunaan unsure-unsur kekuatan kawasan untuk mendapatkan peluang yang ada (SO), penggunaan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman yang akan adatang (ST), pengurangan kelemahan kawasan yang ada dengan memanfaatkan peluang yang ada (WO) dari pengurangan kelemahan yang ada untuk menghadapi ancaman yang akan datang (WT) seperti pada Tabel 2.11.

BRAWIJAYA

Tabel 2.14 Matriks Hasil Analisis SWOT

	Strength	Weakness
	SO1	WO1
Opportunity	SO2	WO2
	SOn	Won
	ST1	WT1
Threat	ST2	WT2
	STn	WTn

Sumber: Rangkuti, 2000

Strategi yang dihasilkan terdiri dari beberapa alternatif strategi. Untuk menentukan prioritas strategi yang harus dilakukan, maka dilakukan penjumlahan bobot yang berasal dari keterkaitan antara unsure-unsur SWOT yang terdapat dalam suatu alternatif strategi. Jumlah bobot tadi kemudian akan menentukan rangking prioritas alternatif strategi pengelolaan kawasan Tabel 2.12.

Tabel 2.15 Rangking Alternatif Strategi

			6-	
No	Unsur SWOT	Keterkaitan	Bobot	Prioritas
		Strategi SO	2	
1	SO1	S1,S2,S3,Sn,O1,O2,O3,On		
2	SO2	S1,S2,S3,Sn, O1,O2,O3,On	<i>3</i> 7	
3	SO3	S1,S2,S3,Sn, O1,O2,O3,On	/ {	
4	SOn	S1,S2,S3,Sn, O1,O2,O3,On		
		Strategi ST		
1	ST1	S1,S2,S3,Sn,T1,T2,T3,Tn		
2	ST2	S1,S2,S3,Sn, T1,T2,T3,Tn		
3	ST3	S1,S2,S3,Sn, T1,T2,T3,Tn		
4	STn	S1,S2,S3,Sn, T1,T2,T3,Tn		
		Strategi WO		
1	WO1	W1,W2,W3,Wn,O1,O2,O3,On		
2	WO2	W1,W2,W3,Wn,O1,O2,O3,On		
3	WO3	W1,W2,W3,Wn,O1,O2,O3,On		
4	WOn	W1,W2,W3,Wn,O1,O2,O3,On		
HITT		Strategi WT		
1	WT1	W1,W2,W3,Wn,T1,T2,T3,Tn		
2	WT2	W1,W2,W3,Wn,T1,T2,T3,Tn		
3	WT3	W1,W2,W3,Wn,T1,T2,T3,Tn		
4	WTn	W1,W2,W3,Wn,T1,T2,T3,Tn		CBRE

Sumber: Rangkuti, 2000

2.4.2 Proses Hirarki Analitik

Proses Hirarki Analitik atau *Analytic Hierarchy Process* (AHP) pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. AHP pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan preferensi diantara berbagai alternatif. AHP juga banyak digunakan pada keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya dan penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik (Saaty, dalam Indra 2003).

AHP merupakan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem. Pada penyelesaian persoalan dengan AHP ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami antara lain (Indra, 2003):

- a. Dekomposisi, setelah mendefinisikan permasalahan atau persoalan yang akan dipecahkan, maka dilakukan dekomposisi, yaitu : memecah persoalan yang utuh menjadi unsur unsurnya. Jika menginginkan hasil yang akurat, maka dilakukan pemecahan unsur-unsur tersebut sampai tidak dapat dipecah lagi, sehingga didapatkan beberapa tingkatan persoalan.
- b. *Comparative Judgement*, yaitu membuat penilaian tentang kepentingan relative diantara dua elemen pada suatu tingkatan tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen yang disajikan dalam bentuk matriks *Pairwise Comparison*.
- c. Synthesis of Priority, yaitu melakukan sintesis prioritas dari setiap matriks pairwise comparison "vektor eigen" (ciri) nya untuk mendapatkan prioritas lokal. Matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, oleh karena itu untuk melakukan prioritas global harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal. permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala
- d. *Logical Consistency*, yang dapat memiliki dua makna, yaitu 1) obyek-obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai keseragaman dan relevansinya; dan 2) tingkat hubungan antara obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

Beberapa keuntungan menggunakan AHP sebagai alat analisis adalah (Saaty, dalam Indra, 2003) adalah :

- a. AHP memberi model tunggal yang mudah dimengerti dan luwes untuk beragam persoalan yang tidak terstruktur.
- b. AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.
- c. AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam satu system dan tidak memaksakan pemikiran linier.
- d. AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemenelemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur serupa dalam setiap tingkat.
- e. AHP memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk mendapatkan prioritas.
- f. AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas.
- g. AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.
- h. AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka.
- i. AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang representatif dari penilaian yang berbeda-beda.
- j. AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan.

Pendekatan AHP menggunakan skala banding berpasangan menurut Saaty (1993). Skala banding berpasangan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 2.16 Skala Banding Secara Berpasangan Menurut Saaty (1993)

Skala/tingkat kepentingan	Definisi	Penjelasan	
1	Kedua elemen sama	Dua elemen penyumbang sama kuat pada	
	pentingnya	sifatnya	
3	Elemen yang satu sedikit	Pengalaman dan pertimbangan sedikit	
	lebih penting ketimbng	menyokong satu elemen atas elemen	
	lainnya	lainnya	
5	Elemen yang satu esensial	Pengalaman dan pertimbangan dengan	
	atau sangat penting dari	kuat menyokong satu elemen atas elemen	

Skala/tingkat kepentingan	Definisi	Penjelasan			
	elemen lainnya	lainnya			
7	Satu elemen jelas lebih	Satu elemen dengan kuat disokong dan			
	penting dari elemen lainnya	dominasinya telah terlihat dalam praktek			
9	Satu elemen mutlak lebih	Bukti yang menyok ong elemen yang			
	penting ketimbang lainnya	satu memiliki tingkat penegasan tertingg			
		yang mungkin menguatkannya			
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara 2	Kompromi diperlukan di antara 2			
	pertimbangan	pertimbangan			
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapa	at suatu angka bila dibandingkan dengan			
(1/2,1/3dst)	lst) aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dengan i.				

Sumber: saaty (1993) dalam Indra, 2003

Tahapan dalam melakukan analisis data AHP menurut Saaty (1993) dikemukakan sebagai berikut :

- 1. Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi yang diinginkan. Identifikasi sistem dilakukan dengan cara mempelajari referensi dan berdiskusi dengan para pakar yang memahami permasalahan, sehingga diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
- 2. Penyusunan struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria paling bawah.
- 3. Perbandingan berpasangan, menggambarkan pengaruh relatif setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya. Teknik perbandingan berpasangan yang digunakan dalam AHP berdasarkan *judgement* atau pendapat dari para responden yang dianggap sebagai *key person*. Mereka dapat terdiri atas : 1) pengambil keputusan; 2) para pakar; serta 3) orang yang terlibat dan memahami permasalahan yang dihadapi.
- 4. Matriks pendapat individu, formulasinya dapat disajikan sebagai berikut:

		C1	C2	 Cn	
	C1	1	a12	 a1n	
A = (aij) =	C2	1/a12	1	 a2n	
		1.	7.012		
	Cn	1/a1n	1/a2n	 1	

Dalam hal ini C1, C2, Cn adalah set elemen pada satu tingkat dalam hirarki. Kuantifikasi pendapat dari hasil perbandingan berpasangan membentuk matriks n x n.

Nilai aij merupakan nilai matriks pendapat hasil perbandingan yang mencerminkan nilai kepentingan Ci terhadap Cj.

- 5. Matriks pendapat gabungan, merupakan matriks baru yang elemen-elemennya berasal dari rata-rata geometrik elemen matriks pendapat individu yang nilai rasio inkonsistensinya memenuhi syarat
- 6. Nilai pengukuran konsistensi yang diperlukan untuk menghitung konsistensi jawaban responden
- 7. Penentuan prioritas pengaruh setiap elemen pada tingkat hirarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama.
- 8. Revisi pendapat, dapat dilakukan apabila nilai rasio inkonsistensi pendapat cukup tinggi (> 0,1). Beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar, sebaiknya responden tersebut dihilangkan. Jadi penggunaan revisi ini sangat terbatas mengingat akan terjadinya penyimpangan dari jawaban yang sebenarnya.

2.5 Tinjauan Studi Terdahulu

Beberapa studi yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan studi "Pemanfaatan Kawasan Hutan Berbasis Masyarakat", yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan metode atau analisis yang digunakan.

Hasil Thesis Firkan Maulana (2004) yaitu mengetahui persepsi masyarakat mengenai pemanfaatan hutan secara bersama. Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat desa sekitar hutan terhadap pola pengelolaan hutan secara bersama dan mengkaji masukan Perum Perhutani, Dinas Kehutanan dan LSM tentang penyelenggaran pengelolaan hutan secara bersama

Jurnal skripsi Cut Yusnawati (2004) yaitu untuk mengetahui pengaruh sosial ekonomi masyarakat terhadap pemanfaatan hutan mangrove di Kabupaten Deli Serdang. Peneliti ini mengakji tentang Faktor yang dominan mempengaruhi pemanfaatan hutan.

Karya tulis Yayasan Peduli Hutan Lestari (YPHL) Adnan Wantasan (2002) mengenai kajian potensi sumberdaya hutan mangrove di Desa Talise, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Penelitian ini mengkaji tentang strategi pengelolaan hutan mangrove yang sesuai dengan kondisi fisik mangrove dan ekonomi masyarakat

Tabel 2.17 Tinjauan Studi Terdahulu

No	Judul penelitian	Nama Peneliti	Jenis	Hasil	Perbedaan Studi
	Eksplorasi Persepsi Masyarakat Desa Sekitar Hutan Terhadap Pola Pengelolaan Hutan Secara Bersama	Firkan Maulana (2004)	Thesisi	Perbaikan pengelolaan hutan yang ada di kawasan zona inti DAS Citarum Hulu RPH Wayang Windu berdasarkan masukan masyarakat desa sekitar hutan	Perbedaan dengan studi peneliti adalah pada objek studi dan jangkauan pembahasan sedangkan pada studi peneliti mencangkup beberapa aspek yaitu :Aspek fisik, Aspek Sosial/manusia, aspek pengelolaan hutan.
2	Pengaruh Sosial Ekonomi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Hutan Mangrove di Kabupaten Deli Serdang	Cut Yusnawati. (2004)	Skripsi	Faktor yang dominan mempengaruhi adalah kesiapan masyarakat Faktor sosial ekonomi yang dipengaruhi pemanfaatan hutan mangrove adalah pendapatan dan umur	Peneliti tidak hanya membahas tentang pengaruh social ekonomi masyarakat di sekitar hutan dan pemanfaatannya, hutan tetapi juga menganalisis pendapat dari masyarakat disekitar hutan dan pihak pengelola hutan.
3	Kajian Potensi Sumberdaya Hutan Mangrove di Desa Talise, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara	Adnan Wantasen (2002)	Skripsi	Strategi pengelolaan hutan mangrove yang sesuai dengan kondisi fisik mangrove dan ekonomi masyarakat	Perbedaan penelitian Adnan Wantasan dengan studi yang dilakukan peneliti adalah aspek untuk mengelola hutan tidak hanya dari kondisi fisik hutan dan ekonomi masyarakat tetaoi juga persepsi masyarakat dan pihak pengelola hutan

